



DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LAMONGAN

RANCANGAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN)

TAHUN ANGGARAN
2021



JL. KI SARMIDI MANGUN
SARKORO NO. 6 JETIS



(0322) 321787



prkp@lamongankab.go.id

www.lamongankab.go.id



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah yang mengacu pada Perubahan RKPD. Perubahan Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Perubahan Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;



- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat daerah / lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2021 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Lamongan Tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan operasional dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2021 adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Lamongan bidang Perencanaan diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung.
18. Peraturan Bupati Nomor 188 Tahun 2018 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021;
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020;



1.3 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan tahun 2021.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan adalah sebagai pedoman :

- 1) Pelaksanaan Perangkat Daerah;
- 2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

Bab ini memuat :

- 1.1 Latar belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;



1.3 Maksud dan Tujuan;

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat :

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat :

- 3.1 Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi;
- 3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2021;
- 3.3 Perubahan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat :

- a. Kesimpulan;
- b. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- c. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- d. Rencana Tindak Lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2020, dilaksanakan untuk :

- 1) mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan,;
- 2) mengetahui realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan



Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021.

Pada Tahun 2020 total anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 76.383.406.120,00 dengan rincian Belanja Langsung sebesar Rp. 70.305.493.120,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.077.913.000,00 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 8 program dan 34 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi belanja langsung sebesar Rp. 62.274.991.884,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 88,58 %.

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu tahun 2021 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja tahun 2021 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Periode 2016-2021, dikarenakan Rencana Kerja 2021 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat daerah tahun 2020 dan pencapaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2021
(terlampir)

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja diatas, disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya didukung oleh 8 program, dimana di dalamnya terdiri dari



4 program pendukung dan 4 program utama yang mana target kinerjanya telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target kinerja program yang telah tercapai, meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
5. Program Program Pengembangan Perumahan
6. Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan
7. Program Penataan Bangunan Gedung dan Penataan Ruang
8. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, memiliki 34 kegiatan yang terdiri dari 12 kegiatan pendukung dan 22 kegiatan utama yang mana target kinerja dari semua kegiatan tersebut telah teralisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program / kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah :

- a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program / kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
- b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program / kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.



- c. Adanya Regulasi yang menaungi, sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung, mitra kerja, IT (peta dasar, pemetaan), Manajemen Resiko serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan
(terlampir)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksestabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan



dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu-isu penting di Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan adalah :

- a. Permasalahan Bidang perumahan dan permukiman
 1. Terkendala pada Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota
 2. Terkendala pada Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten
 3. Belum terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
 4. Kurangnya kesadaran masyarakat pada kesehatan lingkungan sehingga menimbulkan permukiman kumuh
 5. Masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni
 6. Masih kurangnya perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) yang sesuai dengan ketentuan.
 7. Masih dibutuhkannya jalan lingkungan dan drainase lingkungan yang baik di kawasan permukiman.



b. Permasalahan Bidang Cipta Karya

1. Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan belum disertai oleh tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur;
2. IMB yang diterbitkan belum menjadi acuan dalam pembangunan gedung
3. Kurangnya perencanaan mengenai Penataan kawasan strategis Kabupaten
4. Kapasitas saluran drainase yang kurang dari debit maksimum
5. Saluran Drainase juga berfungsi sebagai saluran limbah rumah tangga (grey water)
6. Banjir di perkotaan yang belum teratasi
7. Masih rendahnya jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
8. Cakupan layanan sanitasi saat ini masih rendah
9. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan bersih
10. Belum memiliki dokumen perencanaan sanitasi berkualitas
11. Pelayanan sanitasi aman masih belum optimal
12. Prasarana persampahan masih kurang jika dibandingkan luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Lamongan
13. Masih rendahnya kualitas air minum
14. Kurangnya jumlah air baku dan kualitas air baku, sumber air baku yang tidak memadai untuk kebutuhan air minum (air asin)
15. Tingginya biaya yang dibutuhkan untuk pengolahan air baku menjadi air minum dengan menggunakan teknologi yang tepat
16. Pemenuhan kebutuhan air minum melalui jaringan perpipaan masih kurang
17. Kurangnya teknologi dalam pengolahan air baku menjadi air yang layak minum



c. Permasalahan Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi

1. Kurangnya sosialisasi terhadap RTRW sehingga timbul kesalahpahaman oleh masyarakat sekitar
2. Belum adanya sistem informasi penataan ruang yang bisa dilihat secara online sehingga memudahkan masyarakat/investor/ pengembang dalam mengetahui rencana tata ruang daerah
3. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah kurang dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan produk perizinan pemanfaatan ruang
4. Kualitas bangunan kurang sesuai standar
5. Para pengguna jasa konstruksi kurang memahami peraturan perundangan sebagai dasar penyelenggaraan jasa konstruksi
6. Sengketa tanah antara pemerintah dengan masyarakat

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

Rencana Kerja (Renja) perubahan merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) perubahan Tahun 2021 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan.



Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2021 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan.

Program dan kegiatan Tahun 2021 yang telah diusulkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan merupakan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2021 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan.

Tabel 2.3
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2021 Kabupaten Lamongan
(terlampir)

Program / kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan



penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang, bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan, dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dalam hal ini mengkoordinasikan program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Propinsi

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 yaitu Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial , adalah :

Prioritas Nasional 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Prioritas Propinsi : Peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung daya saing daerah menyambut era industri perdagangan dan jasa berbasis agro guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Program yang harus dilaksanakan :

Memulihkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau serta didukung dengan infrastruktur dasar permukiman termasuk air minum dan sanitasi



Sasaran yang akan dicapai :

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau, dengan indikator :
 - a) Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak dan aman dengan indikator:
 - a. Persentase rumah tanggadenganakses air minum jaringan perpipaan (%)
 - b) Persentase rumah tanggadengan akses air minumbukan jaringan perpipaan (%)
 - c) Persentase rumah tanggayang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layakdan aman (%)

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan bidang sarana dan prasarana tahun 2021, arah kebijakan yang akan ditempuh antara lain:

1. Meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau, khususnya untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR) dengan strategi antara lain:
 - (a) fasilitasi penyediaan hunian layak dan terjangkau;
 - (b) fasilitasi peningkatan kualitas hunian;
 - (c) fasilitasi pembiayaan perumahan MBR; dan
 - (d) fasilitasi peningkatan kualitas permukiman dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;



2. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak dengan strategi antara lain:
 - (a) sinergi pembangunan infrastruktur antarprogram perumahan, pemukiman, air minum dan sanitasi, melalui peningkatan koordinasi perencanaan, koordinasi antar pelaku pembangunan, serta sinergi pendanaan;
 - (b) peningkatan peran, kapasitas, serta kualitas kinerja pemerintah daerah, dan lembaga pengelola air minum dan sanitasi; dan
 - (c) peningkatan keterlibatan dan perubahan perilaku masyarakat;

3.2 Perubahan Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 serta RPJM Nasional Tahun 2019-2024 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, adalah:

”Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh



stakeholder's dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- 1) **Terwujudnya** terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.
- 2) **Lamongan** adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan.
- 3) **Lebih Sejahtera** dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan.
- 4) **Lebih Berdaya saing** dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam persaingan ditingkat Global.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021, “**Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing**” ditempuh melalui lima misi. Misi yang terkait dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah :



Misi 3 “Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan”, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016 – 2021, yaitu :

Tujuan

“Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat “

Indikator : Indeks Infrastruktur Permukiman

Sasaran

- Meningkatnya Rumah Layak Huni

Indikator : Indeks Rumah Layak Huni

- Meningkatnya Penanganan luas kawasan permukiman kumuh

Indikator : Indeks Kawasan Permukiman Kumuh



- Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang serta meningkatnya tanah bersertifikat

Indikator : % Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang

% Peningkatan tanah yang bersertifikat

Target tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan tahun 2020 adalah sebagaimana tabel berikut :

3.3 Perubahan Program Dan Kegiatan Tahun 2021

Pada saat negara kita mengalami kejadian yang sulit yaitu adanya wabah / pandemi. COVID 19, maka pemerintah pusat membuat kebijakan mendesak untuk dilaksanakan. Yaitu percepatan pemulihan bidang insfrastruktur sebagai salah satu cara program pemulihan (recovery)/ pasca covid 19.

Sebagai tindak lanjut dari perubahan kebijakan tersebut yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah :

1. Mengoptimalkan penyediaan rumah sewa
2. Penyediaan jalan lingkungan
3. Penyediaan saluran drainase
4. Pengendalian banjir kota
5. Penyediaan air minum
6. Pengelolaan air limbah
7. Penyediaan prasarana persampahan
8. Perencanaan kota (Tata Ruang)



Selain itu yang menjadi pertimbangan dalam perubahan rencana program dan kegiatan tahun 2020 adalah upaya pencapaian target SDG's dan Standar pelayanan minimal yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2020 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Rumusan Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2020
(terlampir)



BAB IV

PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan adalah Program Tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan.

Rancangan Awal Perubahan RENJA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan selain menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021, Rancangan Awal Perubahan RENJA juga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan. Rancangan Awal Perubahan RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan



penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

5.1 Kesimpulan

Rancangan perubahan rencana kerja tahun 2021 disusun dengan pertimbangan beberapa isu penting infrastruktur pelayanan dasar yang menjadi tantangan di tahun 2021 yaitu akses terhadap perumahan dan infrastruktur dasar permukiman yang layak, termasuk air minum dan sanitasi yang harus dipastikan pemenuhannya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Pada sisi lainnya di perumahan dan permukiman padat penduduk/kumuh, risiko penyebaran COVID-19 lebih tinggi dan tidak memungkinkan penderita COVID-19 melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Tantangan lainnya adalah pemulihan industri perumahan. Efek pandemi telah mengancam keamanan bermukim masyarakat, terutama bagi masyarakat dengan lapangan usaha informal maupun formal yang gagal membayar sewa atau kredit rumahnya. Menurunnya kinerja industri perumahan juga memiliki dampak cukup signifikan terhadap perekonomian karena menurunnya penyediaan lapangan kerja karena sektor ini menyerap tenaga cukup besar (padat karya)

5.2 Catatan Penting

Berdasarkan beberapa tantangan yang telah diuraikan, maka arah kebijakan pembangunan infrastruktur pada tahun 2021 akan difokuskan pada upaya mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, di antaranya memulihkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan



aman yang terjangkau sertadidukung dengan infrastruktur dasar permukiman termasuk air minum dan sanitasi.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2021, merupakan evaluasi dari perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021.



5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkan nya dokumen Perubahan Renja Tahun 2021, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Sementara perubahan (KUA P) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS P) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan APBD P.

Lamongan, Juli 2021

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA
KARYA KABUPATEN LAMONGAN**



Ir. SUYATMOKO, MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19640524 199202 1 001

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2021
Kabupaten Lamongan

NAMA PD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

No.	Sasaran Renja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2020			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021 s/d Triwulan II		Catatan / Keterangan
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%) 10 = 9/8	Target	Realisasi	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10 = 9/8	11	12	13
		1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Meningkatnya Penanganan luas kawasan permukiman kumuh	1	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah yang terlayani SPAM						52,21%	0,00%	
		1	03	03	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang terlayani SPAM	12000	13488	2000	6296	314,8	2000	0	
		1	03	04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana dan prasarana persampahan yang tersedia						50%	0,00%	
		1	03	04	2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPS-3R yang dibangun / dipelihara	0	0	0	0	0	6	0	
		1	03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase akses layanan pengolahan air limbah domestik						71,86%	0,00%	
		1	03	05	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang terbangun	1100	2075	250	415	166	250	230	
		1	03	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik						28,73%	0,00%	
		1	03	06	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran drainase / Gorong-gorong perkotaan yang kondisi baik	30000	26536,5	6000			2000	0	
2	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB						57,99%	0,00%	
		1	03	08	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan gedung yang terbangun, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang diterbitkan						80	0	
		1	03	09	2.01	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya						4,17%	0,00%	
		1	03	09	2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan yang tertangani						2,07	0	

		1	03	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi							18,14%	0,00%	
		1	03	11	2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat							50	0	
		1	03	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang							77,01%	0,00%	
		1	03	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah RTRW dan RRTR yang ditetapkan							3	0	
		1	03	12	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan	Jumlah kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana tata ruang							4	0	
		1	04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
3	Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	04	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah							100%	0%	
		1	04	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi yang benar dan tepat waktu	5	4	1	1	100	3	2		
		1	04	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan yang dilaksanakan	5	4	1	1	100	12	6		
		1	04	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan admnistrasi umum yang dilaksanakan	5	4	1	1	100	12	6		
		1	04	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan	5	4	1	1	100	12	0		
		1	04	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	5	4	1	1	100	12	6		
		1	04	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	5	4	1	1	100	12	6		
4	Meningkatnya Rumah Layak Huni	1	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase pemenuhan rumah korban bencana						16,13	0		
		1	04	02	2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah korban bencana dan data rumah yang terkena relokasi program pemerintah						1	0		
		1	04	02	2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Pokja / Satgas, Tim pendamping dan Fasilitator yang dibentuk dan terlatih						1	0		
		1	04	02	2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang sudah terbangun atau diperbaiki						15	0		
		1	04	02	2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus yang dibina pengelolaannya						1	0		
		1	04	02	2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dikeluarkan						4	0		
		1	04	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani						3,06	0		

		1	04	03	2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah ijin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang diterbitkan					4	0	
		1	04	03	2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	25	52,81	5	32,8	656	2	0
							Persentase Rumah Tidak Layak Huni	2100	2515	500	526	105,2	29,65%	0,00%
		1	04	03	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani					250	0	
		1	04	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase rumah yang sudah dilengkapi PSU (Jalan lingkungan + drainase lingkungan)					60,02%	0,00%	
		1	04	05	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)					1875	0	
		2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
5	Meningkatnya Tanah Bersertifikat	2	10	04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi					8,93%	0	
		2	10	04	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi					5	0	
		2	10	05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian santunan atas kerugian tanah untuk pembangunan					100	0	
		2	10	05	2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitasi penyelesaian ganti rugi sengketa tanah					1	0	

Lamongan, Juni 2021

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN KOTA KARYA KABUPATEN LAMONGAN

 

Ir. SUYATMOKO, MMA
Pembina Utama Muda
Nip. 19640524 199202 1 001

Tabel 2.3
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2021
Kabupaten Lamongan

Nama PD : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase Rumah yang terlayani SPAM		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah yang terlayani SPAM		
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah Penambahan jaringan SR di kawasan perdesaan		
1	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Bandungsari Kec.Sukodadi	Kec. Sukodadi		200 SR	
2	Pipanisasi air bersih Desa German, Kec. Sugio Desa German, Kec. Sugio, Kab. Lamongan	Kec. Sugio		213 SR	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Panjang jalan lingkungan, panjang drainase dalam kondisi baik		
3	TPT DSN CREWEK DESA PLABUHANREJO MANTUP			150 M	
4	RABAT BETON JALAN LINGKUNGAN DESA MOJOSARI MANTUP			174 M	

5	RABAT BETON JALAN LINGKUNGAN dsn. sukosari-kedungsuko DS SUKOSARI dsn Kedungsoko MANTUP			174 M	
6	JALAN LINGKUNGAN RABAT BETON DSN SUKLAN DUSUN SUKLAN DESA SUMBERBENDO MANTUP			189 M	
7	JALAN LINGKUNGAN RABAT BETON DUSUN RUMPUK DUSUN RUMPUK DESA RUMPUK MANTUP			174 M	
8	RABAT BETON JALAN LINGKUNGAN DSN KEDUNGSUMER RT 03/RW 01 DS SUMBERDADI MANTUP			126 M	
9	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN DSN DUKOH DSN DUKOH DESA SUKOLILO SUKODADI			121 M	
10	TPT LINGKUNGAN DSN NGUWOK DSN NGUWOK DESA NGUWOK MODO			150 M	
11	TPT LINGKUNGAN DSN SAMBEN DSN SAMBEN-DS JEGREG MODO			155 M	
12	PENINGGIAN JALAN PERMUKIMAN RT 03 RW 06 DESA KAUMAN BABAT			68 M	
13	JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN/JALAN RUSAK DS KEMLAGI LOR TURI			168 M	
14	HOTMIX JALAN LINGKUNGAN RT.9 RW 5 DS. GEDONGBOYOUNTUNG TURI			153 M	
15	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN DSN BALUN-NGAGKRIK DSN ngangkrik ds balun TURI			168 M	
16	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN DESA BLAJO KALITENGAH			153 M	
17	PERBAIKAN JALAN LINGKUNGAN DSN GLUGU DSN GLUGU DESA DLANGGU DEKET			121 M	
18	TPT LINGKUNGAN DSN DELIK DSN DELIK DESA REJOTENGAH DEKET			200 M	
19	TPT JALAN LINGKUNGAN DSN GOWOK DSN GOWOK DESA SIDOBINANGUN DEKET			200 M	

20	RENOVASI GORONG-GORONG DSN PUJUT DESA SIDOMULYO DEKET			200 M	
21	TPT LINGKUNGAN DSN KOTOK DSN KOTOK DESA TUKERTO DEKET			200 M	
22	RABAT BETON JALAN DSN GEBANG SUKORAME			147 M	
23	RABAT BETON JALAN DSN SAMBIROTO SUKORAME			147 M	
24	RABAT BETON JALAN DSN SUKOREJO SUKORAME			147 M	
25	RABAT BETON JALAN POROS DUSUN LAMPEYAN DSN LAMPEYAN -PALUOMBO SUKORAME			147 M	
26	Jalan Lingkungan Permukiman Rt.3 Rw 1 Ds. Miru Sekaran			53 M	
27	PEMBANGUNAN TPT LINGKUNGAN RT 03 RW 03 DSN WANAR DESA WANAR KEC.PUCUK			222 M	
28	PEMBANGUNAN TPT LINGKUNGAN RT 05 RW 01 DSN WANAR DESA WANAR KEC.PUCUK			222 M	
29	PEMBANGUNAN TPT LINGKUNGAN DESA GEMPOLPADING KEC. PUCUK			222 M	
30	PEMBANGUNAN TPT LINGKUNGAN DSN TULUNG DESA WANAR KEC. PUCUK			222 M	
31	PEMBANGUNAN TPT LINGKUNGAN DSN KAYEN DESA JUBEL KIDUL KEC. SUGIO			222 M	
32	PEMBANGUNAN TPT LINGKUNGAN DESA JUBEL LOR KEC. SUGIO			222 M	
33	PEMBANGUNAN SALURAN AIR DESA PLOSO SETRO KEC. PUCUK			222 M	
34	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN (HOTMIX) DSN. WUDI, DS. SUKOANYAR			158 M	
35	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN (HOTMIX) RW 1 DS. BALUN, KEC. TURI			158 M	
36	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN (HOTMIX) DESA DATINAWONG, KEC. BABAT			158 M	

37	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN (RABAT BETON) DSN. DOROCILIK, DS. BATURONO, KEC. SUKODADI			158 M	
38	peningkatan jalan kampung tambaksigaran - rukun santoso Dsn. glugu, Kab. Lamongan, Deket, Dlanggu			195 M	
39	peningkatan Saluran got Tlogoanyar Dsn. Glugu Dsn. Glugu, Kab. Lamongan, Deket, Dlanggu			167 M	
40	peningkatan Jalan kampung dsn Dandangan Dsn. Dandangan, Kab. Lamongan, Deket, Dlanggu			158 M	
41	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN MAKADAM DAN GORONG- GORONG DSN MOJOLEBAK MANGKUJAJAR			158 M	
42	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN MAKAM DSN GENDOT DESA SARIREJO			211 M	
43	TEMBOK PENAHAN TANAH (TPT) LINGKUNGAN DSN WONOREJO DESA WONOKROMO			167 M	
44	PENINGKATJAN JALAN LINGKUNGAN (TPT) DS MOJOKEREP			222 M	
45	Jalan Lingkungan dan TPT Dusun Sahar, Kab. Lamongan, Sambeng, Wateswinangun			222 M	
46	Jalan Lingkungan dan TPT Dusun Tenggiring, Kab. Lamongan, Sambeng, Tenggiring			222 M	
47	Jalan Lingkungan dan TPT Dusun Sidomanis, Kab. Lamongan, Sambeng, Gempolmanis			222 M	
48	Jalan Lingkungan dan TPT Dusun Kasah, Kab. Lamongan, Sambeng, Nogojatisari			222 M	
49	RABAT BETON DSN MAYONG DS SIDPMLAGEAN KEC. KEDUNGPRING			158 M	
50	PERBAIKAN JALAN DESA DEKET desa deket kulon, Kab. Lamongan, Deket, Deketkulon			158 M	
51	PERBAIKAN JALAN DESA BLURI DESA BLURI, Kab. Lamongan, Solokuro, Bluri			158 M	

52	PEMBANGUNAN TPT LINGKUNGAN DSN MODO, DESA KEBONSARI KEC. SUKODADI			211 M	
53	PEMBANGUNAN TPT LINGKUNGAN DSN GETUNG DESA TAWANGREJO KEC. TURI RT.01 RW.01			211 M	
54	PEMBANGUNAN TPT LINGKUNGAN DSN GETUNG DESA TAWANGREJO KEC. TURI RT.03/ RW. 01			167 M	
55	PEMBANGUNAN TPT LINGKUNGAN DSN MELIK DESA CANDI TUNGGAL KEC. KALITENGAH			222 M	
56	PEMBANGUNAN TPT LINGKUNGAN DSN PLAKARAN DESA SUMOSARI KEC. KALITENGAH			222 M	
57	PEMBANGUNAN TPT LINGKUNGAN DSN DOMDOMAN DESA BOJOASRI KEC. KALITENGAH			222 M	
58	PEMBANGUNAN TPT LINGKUNGAN DSN SUNGELEBAK DESA SUNGELEBAK KEC. KARANGGENENG			222 M	
59	Jl. Liposos Rt. 04 Rw. 13 Dsn. Gilang Kel Babat Kec. Babat			105 M	
60	PEMBANGUNAN JALAN MAKAM DUSUN JOGO DESA DERMO LEMAH BANG KEC. SARIREJO			189 M	
61	PEMBANGUNAN JALAN MAKAM DESA KELORARUM KEC. TIKUNG			189 M	
62	JALAN LINGKUNGAN PERUMDA DEKET RT 2/ RW 6 DESA DEKET KULON KEC. DEKET			179 M	
63	PEMBANGUNAN JALAN MAKAM DESA PLOSO WAHYU KEC. LAMONGAN			184 M	
64	PEMBANGUNAN JALAN MAKAM DSN TAMBAKJURIT DESA JATIREJO KEC. TIKUNG			179 M	
65	Tembok Penahan Tanah Jalan Lingkungan Dsn Karangtopen Desa Karanglangit Kec. Lamongan			158 M	
66	Tembok Penahan Tanah Jalan Lingkungan Dsn Miru Desa Puter Kec. Kembangbahu			147 M	

67	JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DUSUN DUREN - DUSUN TEMPURAN DS LAWAK KEC NGIMBANG KAB LAMONGAN			158 M	
68	TEMBOK PENAHAN JALAN DUSUN SIDOBERANTI DESA SIDOMUKTI KAMBANGBAHU LAMONGAN			126 M	
69	Pembangunan Jalan, Pelebaran dan Pengecoran Made RT 03 / RW 01, Kab. Lamongan, Lamongan, Made			209 M	
70	TPT (Tembok Penahan Tanah) Dsn. Tronglo Ds. Sumber Agung Kec. Modo			167 M	
71	Pembangunan Jalan Lingkungan RT 1 RW 3 Desa Sukolilo Kec.Sukodadi			158 M	
72	TPT Desa Sukodadi Desa Sukodadi Kec.Sukodadi			139 M	
73	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Tunjungmekar Kec.Kalitengah			132 M	
74	Pembangunan tutup saluran desa mertani Desa Mertani Kec.Karanggeneng			158 M	
75	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sugihwaras Kec.Kalitengah			126 M	
76	Pembangunan Saluran Pembuang Desa Sumberwudi samping kecamatan karanggeneng Kec.Karanggeneng			126 M	
77	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Kawistolegi Kec Karanggeneng			116 M	
78	Pembangunan jalan Lingkungan Desa Dibee Kec Kalitengah			121 M	
79	Tembok Penahan Tanah Jalan Lingkungan Ds. Jubellor Sugio			105 M	
80	Rehabilitasi Jalan Dan Pembuatan Gapuro Makam Dsn. Kedungsogo Ds. Deketagung Sugio			74 M	
81	Paving Stone Jalan Lingkungan Ds. Bedahan Babat			105 M	
82	Sluran air jalan lingkungan Dsn. Kedungsogo/ Deketagung Sugio			111 M	

83	TPT Ds. Sidorejo Sugio			111 M	
84	Paving Stone Jalan Lingkungan Dsn. Ngadipiro Ds. Gunungrejo Kedungpring			105 M	
85	Jln. Dsn. Brengkok Desa Brengkok Desa Brengkok Brondong			158 M	
86	Jln Lingkungan RT 4 RW 3 Desa Tunggul Paciran			105 M	
87	pembangunan jalan menuju makam dusun Sungaigeneng, Pelang , Kembangbahu,			105 M	

Tabel 3.1
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

NAMA PD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN Cipta Karya

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran				Keterangan
							Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	Perubahan RKPD 2021	Bertambah/Berkurang	
1					2		3				4		5				6
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	126.782.558.040	67.154.530.783	70.607.530.783	3.453.000.000	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	68.357.000.000	29.833.228.000	32.153.228.000	2.320.000.000	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase Penanganan Permukiman Kumuh	34,33%	Persentase Penanganan Permukiman Kumuh	34,33%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	36.407.000.000	15.268.604.000	16.168.604.000	900.000.000	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pembangunan SPAM	23 lokasi	Jumlah Pembangunan SPAM	23 lokasi	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	36.407.000.000	15.268.604.000	16.168.604.000	900.000.000	
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM						Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	580.000.000	0	0	0	
1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Perluasan/Perbaikan SPAM		Jumlah lokasi Pengawasan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Minum	30 lokasi	Pengawasan Pembangunan SPAM	30 lokasi	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	150.000.000	50.000.000	50.000.000	0	
1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		Pembuatan DED (Sharing PDAM) di 2 Lokasi (Tikung Dan Kembangbahu) APBD	4 lokasi	Pembangunan Instalasi Penunjang Mojolagres Pembangunan IPAL	3 lokasi 1 lokasi	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	6.800.000.000	4.805.000.000	4.805.000.000	0	
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Pembangunan SPAM	23 lokasi	Pembangunan SPAM	23 lokasi	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	7.846.000.000	1.181.860.000	1.181.860.000	0	
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Penambahan jaringan SR	32 lokasi	Penambahan jaringan SR	32 lokasi	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	20.906.000.000	9.206.744.000	10.106.744.000	900.000.000	Mengganti paket pikir yang terhapus
1	03	03	2.01	14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM		Pembinaan kepada kelembagaan HIPAMAS	1 lembaga	Pembinaan Kelembagaan (HIPAMAS)	1 lembaga	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	125.000.000	25.000.000	25.000.000	0	
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Persentase Penanganan Permukiman Kumuh	34,33%	Persentase Penanganan Permukiman Kumuh	34,33%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	7.725.000.000	3.322.991.000	3.322.991.000	0	
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pembangunan TPS	15 lokasi	Jumlah Pembangunan TPS	15 lokasi	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	7.725.000.000	3.322.991.000	3.322.991.000	0	
1	03	04	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen lingkungan Pembangunan TPS-3R	15 Lokasi	Data Persampahan	1 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	100.000.000	25.000.000	25.000.000	0	
1	03	04	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota		Monitoring dan evaluasi keberadaan Sistem Pengelolaan persampahan di Lamongan	15 Lokasi	Monitoring dan evaluasi keberadaan Sistem Pengelolaan persampahan di Lamongan	16 lokasi	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	125.000.000	25.000.000	25.000.000	0	
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		Jumlah TPS3R yang terbangun	15 Lokasi	Jumlah TPS3R yang terbangun	5 lokasi	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	7.500.000.000	3.272.991.000	3.272.991.000	0	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase Penanganan Permukiman Kumuh	34,33%	Persentase Penanganan Permukiman Kumuh	34,33%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	9.920.000.000	1.276.633.000	1.396.633.000	120.000.000	
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	18 lokasi	Jumlah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	18 lokasi	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	9.920.000.000	1.276.633.000	1.396.633.000	120.000.000	
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				Dokumen perencanaan EHRA	1 dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	475.000.000	0	120.000.000	120.000.000	dokumen dibutuhkan untuk review SSK (Strategi Sanitasi Kota)
1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		Operasional IPLT	12 bulan	Operasional IPLT	12 bulan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	345.000.000	100.000.000	100.000.000	0	
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik	1 lokasi	Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik	1 lokasi	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	7.500.000.000	1.176.633.000	1.176.633.000	0	
1	03	05	2.01	16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT								1.600.000.000	0	0	0	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase Penanganan Permukiman Kumuh	34,33%	Persentase Penanganan Permukiman Kumuh	34,33%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	9.050.000.000	5.050.000.000	5.825.000.000	775.000.000	

1	03	06	2.01		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong Permukiman	13 lokasi	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong Permukiman	13 lokasi	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	9.050.000.000	5.050.000.000	5.825.000.000	775.000.000	
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran drainase / Gorong-gorong permukiman	13 lokasi	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong Permukiman	13 lokasi	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	7.850.000.000	4.600.000.000	5.200.000.000	600.000.000	Penanganan saluran air untuk mengatasi banjir kota
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Pemeliharaan rutin drainase	2550 meter	Pemeliharaan Rutin Drainase	2550 meter	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	1.200.000.000	450.000.000	625.000.000	175.000.000	Penambahan kegiatan normalisasi saluran air
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang	77,50%	Persentase peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang	77,50%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	80.000.000	40.000.000	40.000.000	0	
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bantuan teknis pemeriksaan dokumen teknis penyelenggaraan bangunan negara (IMB & SLF)	12 bulan	Jumlah Bantuan teknis pemeriksaan dokumen teknis penyelenggaraan bangunan negara (IMB & SLF)	12 bulan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	80.000.000	40.000.000	40.000.000	0	
1	03	08	2.01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan teknis pemeriksaan dokumen teknis penyelenggaraan bangunan negara (IMB & SLF)	12 bulan	Bantuan Teknis Pemeriksaan Dokumen Teknis Penyelenggaraan Bangunan Negara (IMB & SLF)	12 bulan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	50.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
1	03	08	2.01	05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota	Monitoring lapangan penyelenggaraan bangunan negara	12 bulan	Monitoring lapangan penyelenggaraan bangunan negara	12 bulan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	30.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang	77,50%	Persentase peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang	77,50%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	3.745.000.000	4.670.000.000	5.020.000.000	350.000.000	
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Gedung	4 Bangunan	Jumlah Pembangunan Gedung	4 Bangunan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	3.745.000.000	4.670.000.000	5.020.000.000	350.000.000	
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Luas lingkungan yang tertata	1 gedung 1 gedung	Pembangunan Gudang Bahan Bangunan/Elektrikal Penataan Halaman Parkir Belakang Gedung Bhineka Karya	1 gedung 1 gedung	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	3.420.000.000	4.552.000.000	4.902.000.000	350.000.000	Hibah gedung knt kejaksaan, penilikan kelayakan struktur tugu batas, studi kelayakan RSUD type D Brondong, DED RTP ds Brondong
1	03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan umum / tugu yang terpelihara	12 lokasi	Jumlah bangunan umum / tugu yang terpelihara	12 lokasi	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	325.000.000	118.000.000	118.000.000	0	
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang	77,50%	Persentase peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang	77,50%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	410.000.000	50.000.000	150.000.000	100.000.000	
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	100 orang	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	100 orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	410.000.000	50.000.000	150.000.000	100.000.000	
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Bersertifikat	100 orang 100 orang	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat Pembekalan dan sertifikasi tenaga tampil konstruksi	100 orang 100 orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	300.000.000	25.000.000	125.000.000	100.000.000	menambah tenaga terampil yang bersertifikat
1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Badan Usaha yang memenuhi syarat kapasitas konstruksi	2 badan 1 kali	Jumlah badan usaha yang memenuhi syarat kapasitas konstruksi Sosialisasi peraturan penyelenggaraan jasa konstruksi	2 badan 1 kali	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	110.000.000	25.000.000	25.000.000	0	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang	77,50%	Persentase peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang	77,50%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	1.020.000.000	155.000.000	230.000.000	75.000.000	
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah Dokumen Pendampingan Persetujuan Substansi RDTR	3 dokumen	Jumlah Dokumen Pendampingan Persetujuan Substansi RDTR	3 dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	290.000.000	95.000.000	95.000.000	0	
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Pendampingan Persetujuan Substansi RDTR BWP Lamongan Pendampingan Persetujuan Substansi RDTR BWP Ngimbang Pendampingan Persetujuan Substansi RDTR BWP Tikung	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Pendampingan Persetujuan Substansi RDTR BWP Lamongan Pendampingan Persetujuan Substansi RDTR BWP Ngimbang Pendampingan Persetujuan Substansi RDTR BWP Tikung	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	250.000.000	95.000.000	95.000.000	0	

1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang					Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	40.000.000	0	0	0	
1	03	12	2.02		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	480.000.000	0	0	0	
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota					Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	480.000.000	0	0	0	
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatn ruang	4 kali	Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatn ruang	4 kali	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	250.000.000	60.000.000	135.000.000	75.000.000	
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatn ruang	4 kali	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	60.000.000	0	75.000.000	75.000.000	
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	pembuatan aplikasi (peta, dokumen)	1 Paket	Pembuatan Aplikasi(Peta, Dokumen)	1 Paket	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	190.000.000	60.000.000	60.000.000	0	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	58.425.558.040	37.321.302.783	38.454.302.783	1.133.000.000	
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% Dokumen perencanaan, Laporan Kinerja, dan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	% Dokumen perencanaan, Laporan Kinerja, dan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	31.598.058.040	6.736.223.783	7.586.223.783	850.000.000	
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	140.000.000	125.000.000	125.000.000	0	
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun secara benar dan tepat waktu	2 dokumen	Dokumen kelengkapan SAKIP (dokumen perencanaan) Dokumen rencana kerja Dokumen Renstra Input Cashbudget Input RKA Input SIRUP Menyelenggarakan forum OPD	1 Paket 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Kali 2 Kali 2 Kali 1 Kali	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	100.000.000	90.000.000	90.000.000	0	
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKP), LPKD, LKIP, Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun)	5 Dokumen	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tunjangan Program	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	40.000.000	35.000.000	35.000.000	0	
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan		12 bulan	Laporan capaian kinerja	12 bulan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	6.433.813.144	3.875.644.383	4.725.644.383	850.000.000	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	60 Orang	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	6.153.813.144	3.845.644.383	4.695.644.383	850.000.000	
1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun Secara Benar dan Tepat Waktu	1 Dokumen	Laporan Aset akhir tahun Laporan Keuangan akhir tahun	1 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	20.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun Secara Benar dan Tepat Waktu	1 Dokumen	Database Dinas Input Realisasi Anggaran Laporan Capaian Kinerja Laporan Kegiatan Setiap Bulan Laporan Keuangan Semesteran Laporan Realisasi Anggaran setiap bulan Video Hasil pembangunan	1 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 1 Video	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	260.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	235.150.000	0	0	0	
1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya					Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	185.150.000	0	0	0	
1	04	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	20.000.000	0	0	0	
1	04	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	30.000.000	0	0	0	
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemeliharaan rutin perkantoran	12 bulan	Pemeliharaan rutin perkantoran	12 bulan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	450.000.000	250.500.000	250.500.000	0	

1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dipenuhi	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dipenuhi	10 Item	Alat Listrik dan Elektronik yang tersedia	10 item	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komputer Mesin Fotocopy Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Printer Scanner	2 unit 1 unit 10 item 1 unit 1 unit	Komputer Mesin Fotocopy Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Printer Scanner	2 unit 1 unit 10 item 1 unit 1 unit	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	145.000.000	75.000.000	75.000.000	0	
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Garpu, Gelas, Piring, Sendok	10 lusin	Garpu, Gelas, Piring, Sendok	10 lusin	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ATK yang tersedia	25 item	ATK yang tersedia	25 item	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	60.000.000	40.000.000	40.000.000	0	
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Penggandaan	200 lembar 35 kali 20000 lembar	Cetak Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Penggandaan	200 lembar 35 kali 20000 lembar	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	80.000.000	55.500.000	55.500.000	0	
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar yang tersedia	14 Surat Kabar	Surat kabar yang tersedia	14 Surat Kabar	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	18.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Dilaksanakan	98 Kali	Makanan dan Minuman yang disediakan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan	20 item 98 kali	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	122.000.000	40.000.000	40.000.000	0	
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang penunjang yang dibutuhkan	3 jenis	Jumlah barang penunjang yang dibutuhkan	1 jenis	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	940.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
1	04	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang dibutuhkan	2 unit	Jumlah Kendaraan Roda 3 yang dibeli	1 unit	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	650.000.000	0	0	0	
1	04	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur (Almari) Jumlah Pengadaan Mebeleur (Kursi Kerja) Jumlah Pengadaan Mebeleur (Kursi Tamu) Jumlah Pengadaan Mebeleur (Meja Kerja) Jumlah Pengadaan Mebeleur (Meja Laboratorium) Jumlah Pengadaan Mebeleur (Rak Arsip)	2 Buah 25 Buah 3 Set 10 Buah 1 Set 3 Buah			Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	130.000.000	0	0	0	
1	04	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dibutuhkan (CCTV) Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dibutuhkan (Komputer)	5 Unit 5 Unit	AC CCTV	5 unit 10 unit	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	160.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang yang ditangani	4 jenis	Jumlah jasa penunjang yang ditangani	4 jenis	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	22.801.094.896	2.207.226.000	2.207.226.000	0	
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Terkirim	500 Surat	Jumlah surat yang terkirim	12 bulan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	1.500.000	500.000	500.000	0	
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Air Pembayaran Tagihan Fax Pembayaran Tagihan Listrik Pembayaran Tagihan Telepon	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Jasa air, internet, listrik, telepon	12 bulan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	21.339.222.896	1.050.000.000	1.050.000.000	0	
1	04	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang Terbayar	20 Unit	Jasa perbaikan LCD Proyektor Jasa Perbaikan mesin fotocopy Jasa perbaikan sound system	2 unit 1 unit 2 unit	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	12.000.000	13.000.000	13.000.000	0	
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Administrasi Keuangan yang Terbayar Administrasi BPJS Kesehatan Clining Servis Pegawai Honorer Premi Asuransi Security	11 Jasa Administrasi 89 Orang 1 Tahun 4 Orang 6 Orang 1 Tahun 2 Orang	Jasa Kebersihan Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan Jasa tenaga Pengamanan	4 orang 5 orang 95 orang 2 orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	1.448.372.000	1.143.726.000	1.143.726.000	0	
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang milik daerah yang dipelihara	4 jenis	Barang milik daerah yang dipelihara	4 jenis	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	598.000.000	257.853.400	257.853.400	0	

1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan Yang Dipelihara	1 unit	Belanja STNK Pajak Kendaraan Bermotor	14 Unit 19 Unit	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	45.000.000	27.853.400	27.853.400	0	
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara	20 unit	Kendaraan Operasional yang terpelihara Mobil jabatan yang terpelihara	46 unit 1 unit	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	303.000.000	70.000.000	70.000.000	0	
1	04	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeleur Yang Dipelihara	3 item			Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	10.000.000	0	0	0	
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab Gudang DiDinas Perkim	1 gedung	Pemeliharaan AC, Pompa air Pemeliharaan Gedung kantor	2 unit 1 unit	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	200.000.000	150.000.000	150.000.000	0	
1	04	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Yang Dipelihara	2 unit	Pembangunan Gedung Pemeliharaan CCTV, antena internet, korden	1 unit 4 jenis	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	40.000.000	10.000.000	10.000.000	0	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	% Peningkatan pengendalian pemanfaatn ruang	62,76%	% Peningkatan pengendalian pemanfaatn ruang	62,76%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	4.862.500.000	860.000.000	1.060.000.000	200.000.000	
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Survey lokasi daerah rawan bencana	1 dokumen	Survey lokasi daerah rawan bencana	1 dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	225.000.000	190.000.000	190.000.000	0	
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Survey lokasi daerah rawan bencana	1 dokumen	Survey lokasi daerah rawan bencana	1 dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	100.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Rumah Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Rencana Tata Ruang	10 rumah	Pendataan rumah rusak akibat bencana	1 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	50.000.000	150.000.000	150.000.000	0	
1	04	02	2.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rencana tata ruang.	20 rumah	Pendataan dan Verifikasi penerima rumah	1 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	75.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah tim pokja/stags, tim pendamping dan fasilitator yang dibentuk	1 tim	Jumlah tim pokja/stags, tim pendamping dan fasilitator yang dibentuk	1 tim	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	200.000.000	60.000.000	60.000.000	0	
1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah masyarakat tanggap bencana yang telah diberikan sosialisasi secara tepat dan benar	1 kali	Sosialisasi Masyarakat Tanggap Bencana	2 kali	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	50.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
1	04	02	2.02	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	1 kali	Pembentukan dan pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	1 kali	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	100.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
1	04	02	2.02	05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah calon penerima bantuan rumah terdampak bencana yang terverifikasi	10 rumah	Penentuan calon penerima bantuan rumah terdampak bencana yang terverifikasi	3 kali	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	50.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi rumah terdampak bencana yang tertangani secara benar & tepat waktu	10 rumah	Rehabilitasi rumah terdampak bencana yang tertangani secara benar & tepat waktu	10 rumah	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	4.037.500.000	300.000.000	300.000.000	0	
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rehabilitasi rumah terdampak bencana yang tertangani secara benar & tepat waktu	10 rumah	Jumlah rehabilitasi rumah terdampak bencana yang tertangani secara benar & tepat waktu	10 rumah	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	4.037.500.000	300.000.000	300.000.000	0	
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penyusunan dokumen administrasi Rusunawa yang terakomodir secara baik dan benar	1 dokumen	Penyusunan dokumen administrasi Rusunawa yang terakomodir secara baik dan benar	1 dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	300.000.000	290.000.000	490.000.000	200.000.000	
1	04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	kelembagaan dan pemeliharaan rutin Rusunawa yang terkelola dengan baik	12 bulan	Pembentukan kelembagaan Pemeliharaan rutin Rusunawa yang terkelola dengan baik	1 lembaga 1 lokasi	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	100.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah dokumen administrasi rusunawa yang terakomodir secara baik dan benar	5 dokumen	Penyusunan dokumen administrasi Rusunawa yang terakomodir secara baik dan benar	1 dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	200.000.000	270.000.000	470.000.000	200.000.000	

1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatn ruang	3 kali	Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatn ruang	3 kali	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	100.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rata-rata sertifikasi dan registrasi bagi perencana perumahan dan permukiman dengan kemampuan kecil dalam satu tahun	5 kali	Koordinasi dan sinkronisasi	3 kali	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	100.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan Permukiman Kumuh	34,33%	Persentase Penanganan Permukiman Kumuh	34,33%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	7.045.000.000	6.841.104.000	6.924.104.000	83.000.000	
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi	4 kali	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi	4 kali	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	75.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	5 kali	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi	4 kali	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	75.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Penyusunan rencana Penetapan Lingkungan(RPLP) 2021-2025	1 dokumen	Penyusunan rencana Penetapan Lingkungan(RPLP) 2021-2025	1 dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	510.000.000	70.000.000	153.000.000	83.000.000	
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	Luas total kawasan permukiman kumuh dengan luas masing-masing kawasan di bawah 10 Ha (Satuan: Ha)	10 kali	Penetapan lokasi permukiman kumuh	1 dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	60.000.000	20.000.000	53.000.000	33.000.000	
1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Penyusunan Rencana Penataan Lingkungan (RPLP) 2021 - 2025	2 dokumen	Penyusunan rencana Penetapan Lingkungan(RPLP) 2021-2025	1 dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	400.000.000	50.000.000	100.000.000	50.000.000	
1	04	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Rapat Koordinasi dan sinkronisasi memorandum program RPLP dengan POKJA PKP dengan masing masing OPD	4 kali			Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	50.000.000	0	0	0	
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan rumah tidak layak huni	110 unit	Jumlah Perbaikan rumah tidak layak huni	110 unit	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	6.460.000.000	6.751.104.000	6.751.104.000	0	
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Penyusunan DED (SEDAYU LAWAS)	1 dokumen			Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	100.000.000	0	0	0	
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Penyusunan DED (SEDAYU LAWAS)	1 dokumen	Rumah layak huni di permukiman kumuh	166 unit	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	3.000.000.000	2.551.104.000	2.551.104.000	0	
1	04	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Perbaikan rumah tidak layak huni	110 unit	Perbaikan rumah tidak layak huni	110 unit	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	3.360.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	0	
1	04	04			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penanganan Permukiman Kumuh	34,33%	Persentase Penanganan Permukiman Kumuh	34,33%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	14.920.000.000	22.883.975.000	22.883.975.000	0	
1	04	04	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Pembanguna jalan lingkungan permukiman	13 lokasi	Pembanguna jalan lingkungan permukiman	13 lokasi	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	14.920.000.000	22.883.975.000	22.883.975.000	0	
1	04	04	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Taman Jumlah lampu yang direhabilitasi (Item) Panjang jalan lingkungan yang dibangun (M) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Permukiman Pemeliharaan Rutin Pertamanan Rehab Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik (M)	2 hektar 200 tiang 2000 meter 200 tiang 2 hektar 2000 meter	Pemasangan penerangan jalan umum Pembangunan jalan lingkungan permukiman Pembangunan taman Pemeliharaan jalan lingkungan Pemeliharaan PJU Pemeliharaan taman	200 tiang 2000 meter 2 hektar 2 hektar 200 tiang 2 hektar	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	14.920.000.000	22.883.975.000	22.883.975.000	0	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	160.000.000	95.000.000	95.000.000	0	
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	160.000.000	95.000.000	95.000.000	0	

2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	% peningkatan tanah yang bersertifikat	46,50%	% peningkatan tanah yang bersertifikat	46,50%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	55.000.000	50.000.000	50.000.000	0	
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Pelaksanaan kegiatan rapat mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa	12 bulan	Pelaksanaan kegiatan rapat mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa	12 bulan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	55.000.000	50.000.000	50.000.000	0	
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Menginventarisasi pengaduan masyarakat	5 kali	Menginventarisasi pengaduan masyarakat	12 bulan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	25.000.000	22.500.000	22.500.000	0	
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Melaksanakan kegiatan rapat mediasi penyelesaian sengketa	5 kali	Pelaksanaan kegiatan rapat mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa	12 bulan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	30.000.000	27.500.000	27.500.000	0	
2	10	05	2.01		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	% peningkatan tanah yang bersertifikat	46,50%	% peningkatan tanah yang bersertifikat	46,50%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	105.000.000	45.000.000	45.000.000	0	
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jasa penilaian hak atas tanah untuk kepentingan umum	1 dokumen	Jasa penilaian hak atas tanah untuk kepentingan umum	1 dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	105.000.000	45.000.000	45.000.000	0	
2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	SK Penetapan Daftar Nama Penerima Ganti Rugi Dampak Pembangunan Pemerintah yang tersusun	5 kali	SK penetapan daftar nama penerima ganti rugi dampak pembangunan pemerintah yang tersusun	1 dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	30.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Belanja kegiatan pengadaan tanah dan jasa penilaian hak atas tanah untuk kepentingan umum	5 kali	Jasa penilaian hak atas tanah untuk kepentingan umum	1 dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	75.000.000	25.000.000	25.000.000	0	
TOTAL												126.942.558.040	67.249.530.783	70.702.530.783	3.453.000.000	